



Pelaksanaan *Smart Governance* di Kabupaten Ciamis

Teny Cartika¹, Dini Yuliani², H. Otong Husni Taufiq³

Universitas Galuh

cartikateny@gmail.com

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Mekarjaya, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis,
Jawa Barat 46274

Korespondensi penulis: cartikateny@gmail.com

Abstract. *Fiscal problems often escape the attention of regions responsible for developing smart cities as part of the implementation of the 100 Smart Cities movement initiated by the central government. The Ministry of Communication and Information is the initiator of implementing the smart city program. To be able to build a smart city, what must first be done is the readiness of a local government to be able to prepare the main elements. Referring to the Ciamis Regency smart city master plan (2023), Ciamis Regency is one of the districts that implements the smart city policy. However, in implementing the smart city, the Ciamis Regency Government faces various complex problems. Therefore, this research focuses on smart governance which aims to increase the efficiency of Ciamis Regency government governance. This research uses a descriptive qualitative research methodology with data collection techniques for primary subjects in the form of interviews with several officials from the Ciamis Regency Communication and Information Service as well as secondary subjects in the form of literature, documents, reports and statutory regulations to strengthen research data.*

Keywords: Kabupaten Ciamis, *Smart City*, *Smart Governance*

Abstrak. Permasalahan fiskal seringkali luput dari perhatian daerah yang bertanggung jawab mengembangkan *smart city* sebagai bagian dari implementasi gerakan 100 Kota Cerdas yang digagas pemerintah pusat. Kementerian Kominfo sebagai inisiator dilaksanakannya program *smart city*. Untuk bisa membangun *smart city*, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah kesiapan sebuah pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan elemen utamanya. Merujuk kepada *Masterplan smart city* Kabupaten Ciamis (2023), Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan kebijakan *smart city*. Namun pada penerapan *smart city*, Pemerintah Kabupaten Ciamis menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, pada penelitian ini berfokus pada *smart governance* yang memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data kepada subjek primer berupa wawancara bersama beberapa aparatur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis serta subjek sekunder berupa literatur, dokumen, laporan, dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat data penelitian.

Kata kunci: Kabupaten Ciamis, *Smart City*, *Smart Governance*

LATAR BELAKANG

Sejak awal abad 21, perkembangan teknologi informasi di dunia terus berkembang secara masif. *Hootsuite dan We Are Social* pada Januari 2020 sebanyak 59% penduduk dunia sudah dapat mengakses Internet. Fenomena serupa terjadi juga di Indonesia. Dalam survei yang sama, *Hootsuite* memperkirakan internet sudah dapat diakses oleh 64% warga Indonesia atau sekitar 175,4 juta jiwa. Sedangkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) kuartal kedua 2020 menunjukkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% atau sudah dapat diakses oleh 196,71 juta penduduk Indonesia (APJII, 2020). Besarnya jumlah pengguna digital berdampak pada semakin banyaknya pengguna layanan digital dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Seiring dengan lompatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta konsep pemerintahan modern yang semakin maju, pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan kemampuan pengambilan keputusan mereka dan meningkatkan tingkat layanan sosial mereka dengan memanfaatkan sarana teknologi yang muncul untuk mengembangkan urusan pemerintahan yang cerdas. Berbagai studi menyangkal kemampuan TIK negara bagian untuk secara radikal mengubah hubungan warga dan pemerintah dalam urusan publik.

Permasalahan fiskal seringkali luput dari perhatian daerah yang bertanggung jawab mengembangkan *smart city* sebagai bagian dari implementasi gerakan 100 Kota Cerdas yang digagas pemerintah pusat. Kementerian Kominfo sebagai inisiator dilaksanakannya program *smart city*. Untuk bisa membangun *smart city*, terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah kesiapan sebuah pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan elemen utamanya. Kabupaten Ciamis sebagai salah satu bagian dari beberapa Kabupaten di Jawa Barat, menjadi salah satu contoh perkotaan yang memang memiliki permasalahan yang cukup kompleks dalam penyelenggaraannya. Merujuk kepada *Masterplan smart city* Kabupaten Ciamis 2023, permasalahan di Kabupaten Ciamis sangatlah kompleks dan berkembang, sehingga dirasanya bahwa solusi-solusi konvensional itu kurang bisa mengejar kecepatan pertumbuhan permasalahan yang terjadi.

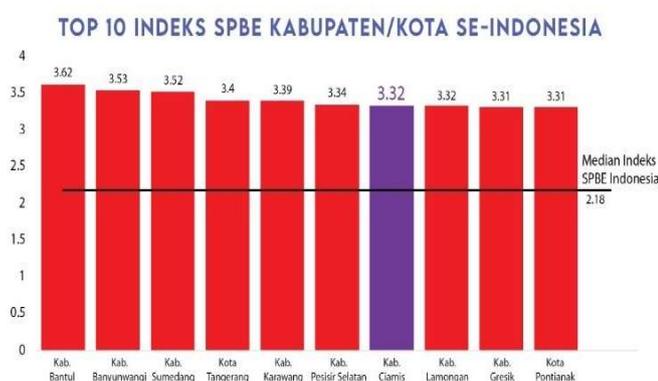
Dalam penjabarannya Kabupaten Ciamis harus memiliki kesiapan kesiapan *Smart City*. Ini mencakup beberapa elemen utama kesiapan *Smart City* yaitu: *Nature; tructure; infrastruktur; suprastruktur; dan Culture*. Kabupaten Ciamis pun memiliki *framework* sendiri dalam menjalankan elemen-elemen pembangunan di dalam *smart city*. Keenam dimensi tersebut diantaranya: *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment*. Maka dari itu, perlu adanya solusi yang lebih inovatif (*smart*) agar bisa menjawab persoalan yang terjadi. Di sini, Kabupaten Ciamis mengambil langkah dengan memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang nantinya menjadi landasan utama pembangunan perkotaan secara cerdas.

Dari adanya enam dimensi *smart city* yang dijalankan oleh Kabupaten Ciamis, fokus penelitian ini akan membahas seputar pelaksanaan *smart governance* yang memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan Kabupaten Ciamis. Secara pengertiannya, *smart governance* ini merupakan tindakan bagaimana sebuah organisasi mengelola tata kelola pemerintahannya secara cerdas dan juga cepat, efektif, efisien, responsif,

komunikatif, serta berkelanjutan agar bisa meningkatkan kinerja birokrasinya melalui inovasi dan adopsi teknologi yang ada. *Smart governance* ini menjadi unsur utama penyelenggaraan *smart city* di kabupaten/kota karena direkomendasikan untuk bisa menjadi basis keberhasilan dimensi *smart city* lainnya. Adapun melihat kepada indikator pelaksanaan *smart governance*, terdapat tiga pola besar yang harus diimplementasikan ke dalam unsur tata kelolanya, yaitu: adanya pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), serta kebijakan (*policy*).

Dalam pelaksanaan *smart governance* terdapat Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disebut dengan SPBE yang merupakan bentuk inovasi *smart governance* yang dilakukan dalam pemerintahan guna untuk melaksanakan kegiatan pelayanan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna SPBE. Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, SPBE mempunyai tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki inovasi cukup baik di bidang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik. Inovasi tersebut diantaranya *website* ciamiskab.go.id, yang merupakan *official* domain portal resmi mengenai informasi pemerintahan Kabupaten Ciamis. Adapun dari data indeks SPBE Kabupaten Ciamis yang tercantum dalam Surat Keputusan Kementerian Negara dan Reformasi birokrasi (kemnpan RB) No. 1503 tahun 2021 tentang hasil evaluasi SPBE pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah tahun 2021 Kabupaten Ciamis masuk ke dalam TOP 10 indeks SPBE Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kabupaten Ciamis berada di urutan ke 6 setelah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Ciamis mendapatkan indeks SPBE 3.32 dengan predikat B atau baik.



Sumber: Diskominfo Ciamis

Gambar 1. 10 Top indeks SPBE Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Namun terdapat permasalahan *smart governance* di Kabupaten Ciamis yaitu kurang optimalnya pelaksanaan *smart governance* di Kabupaten Ciamis. Meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis memiliki inovasi yang cukup baik dalam menyusun *Masterplan smart city* dan SPBE, namun pada kenyataan dilapangan masih terdapat kelemahan, khususnya berkaitan dengan alat dan *tools* atau layanan, dalam aspek penyelenggaraan SPBE dan Audit TIK, serta belum terpenuhinya aspek penyelenggaraan SPBE yang berpotensi membawa dampak pada implementasi SPBE di Kabupaten Ciamis yang tidak terkoordinasi dengan baik, serta terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi antar Satuan Kerja secara kolaboratif. Oleh karena itu hal tersebut perlu menjadi perhatian lebih dari semua sektor. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penelitian ini ingin mengkaji mengenai bagaimana Pelaksanaan *Smart Governance* di Kabupaten Ciamis.

KAJIAN TEORITIS

Smart city

Perkembangan teknologi tidak dipungkiri merupakan salah satu determinan penting dalam perkembangan konsep *smart city*. Secara lebih komprehensif, Nam dan Pardo (2011) melihat bahwa: “Teknologi bukan satu-satunya faktor dalam *smart city*. Masih ada 2 (dua) faktor lain yakni faktor institusional dan faktor manusia sebagai pendukung tumbuh dan berkembangnya konsep *smart city*”.

Menurut Nam & Pardo (2011b), “*Smart city* adalah kota yang mampu mengidentifikasi masalah sejak dini berdasarkan data yang dimiliki untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam proses pencegahan, penanggulangan dan pembangunan dengan kolaborasi pada setiap entitas dan domain”. *Smart city* memfasilitasi masuknya informasi ke dalam infrastruktur fisik melalui beragam aplikasi sehingga kota mengetahui kebutuhan riil masyarakat secara dini agar dapat meningkatkan kualitas hidup, membuat operasi dan layanan perkotaan berjalan efisien, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang (UNECE & ITU, n.d.; Yudatama, n.d.). Adapun model *smart city* yang dikembangkan terdiri dari 6 (Enam) komponen utama yaitu:

1. *Smart Governance*: sebuah konsep pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta termasuk tata kelola kota pemerintahan daerah yang cerdas dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik

dalam proses pengambilan Keputusan. Dalam implementasinya, *Smart Governance* dapat mengintegrasikan beberapa sistem seperti *E-Government*, *E-Democracy*, dan *E-Participation*.

2. *Smart Branding*: pencitraan daerah kota yang cerdas bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah Kota.
3. *Smart Economy*: memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada aspek *Smart Economy* kota haruslah ditopang pada perekonomian yang sangat baik serta dapat meningkat setiap tahunnya. Kegiatan ekonomi itu sendiri berjalan dengan baik jika tata Kelola dan infrastruktur disiapkan oleh pemerintah kota dengan berkualitas dan terhindar dari tangan-tangan vandalisme.
4. *Smart Living*: rasa nyaman yang dapat diperoleh Masyarakat dengan adanya beberapa indikator berikut dalam sebuah kota yaitu Kesehatan, perumahan, aksesibilitas, persampahan, energi, keanekaragaman hayati, air, teknologi, dan transportasi.
5. *Smart Society*: masyarakat yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
6. *Smart environment*: merupakan terbentuknya kota dan lingkungan yang layak huni melalui berbagai fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan. Dalam aspek penataan ruang Kajian Pengembangan Smart City di Indonesia akan dilihat secara spesifik tentang *smart green waste*, *smart green water*, *smart green energy*. Selain itu akan dilihat pula bagaimana kegiatan penataan ruang yang berbasis TIK.

Smart governance

Smart governance adalah salah satu dimensi dari *smart city* yang mengutamakan dari sisi pengaturan pemerintahan. Oleh karena itu penerapan *smart city* selalu diawali oleh dimensi *smart governance*. Untuk menciptakan tata kelola serta upaya pemerintahan yang transparansi terhadap masyarakat serta jujur, bersih dan adil maka diperlukan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat.

Indikator dari *smart governance* meliputi faktor dari sisi politik yaitu adanya keterlibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan, pelayanan publik dan sosial bagi masyarakat serta pemerintahan yang transparan. *Smart governance* merupakan yang paling utama untuk diterapkan dalam pemerintahan karena merupakan pusat perhatian masyarakat

yang sangat sensitif terkait kebutuhan utama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sehingga *impact of public service* yang diperoleh dapat berupa peningkatan kepuasan masyarakat. *Smart Governance* sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang berinvestasi “dalam teknologi yang sedang berkembang ditambah dengan strategi inovatif untuk mencapai struktur pemerintahan dan infrastruktur pemerintahan yang lebih gesit dan tangguh” (Gil-Garcia et al., 2014: 1)

Smart Governance juga disebut oleh Mellouli, Luna Reyes dan Zhang (2014) sebagai penggunaan ekstensif teknologi oleh pemerintah, mengikuti dua tren penting: gerakan untuk membuka data dan teknologi di mana-mana, yang berkontribusi untuk lebih memahami masalah masyarakat dan meningkatkan hubungan pemerintahan dengan warga negara, organisasi swasta, LSM, dan pemerintah lainnya. *Smart Governance* secara umum didefinisikan sebagai kapasitas penerapan teknologi digital dan aktivitas cerdas dalam memproses informasi dan pengambilan keputusan (Scholl & Alawadhi, 2016). Tata kelola elektronik umumnya didefinisikan sebagai penerapan teknologi oleh pemerintah untuk mengubah diri mereka sendiri, interaksi mereka dengan pelanggan dan hubungan dengan warga negara, bisnis, aktor non-negara lainnya dan badan pemerintah lainnya, yang menciptakan dampak pada masyarakat (Estevez & Janowski, 2013; Janowski et al., 2012).

Model *e-government*

Model *e-government* telah berkembang melalui empat langkah: birokrasi, manajemen informasi, partisipasi warga, dan pemerintahan. Keragaman dan kedewasaan sosial adalah faktor yang signifikan untuk meningkatkan *e-government*. Oleh karena itu *E-government* adalah teknologi, melainkan salah satu dari masyarakat, budaya, dan politik. Berikut adalah empat model *e government* menurut Kim (2003) dalam (Indrayani, 2016:36) menyatakan:

1. Model birokrasi memiliki tujuan kebijakan utama yang berfokus pada fungsi administrasi yang efisien dalam struktur pemerintahan dan sektor individu. Model belum matang dalam masyarakat sipil, dengan konsekuensi yang sangat rendah keikutsertaan warga dalam keputusan kebijakan.
2. Model manajemen informasi adalah hubungan antara pemerintah dan warga dalam hal pelayanan publik elektronik. Namun, masih terdapat input yang tidak signifikan terhadap keputusan kebijakan, karena partisipasi warga negara dalam masyarakat sipil telah melemah.
3. Model partisipasi warga memiliki keterlibatan warga yang positif dan kuat dalam keputusan kebijakan melalui interaksi dua arah. Model mencoba untuk menekankan.

Demokrasi dan transparansi dengan menggunakan teknologi informasi. Namun, ada banyak layanan yang tersedia melalui aplikasi internet atau teknologi informasi. Dalam model ini, tingkat masyarakat sipil telah matang.

4. Model tata kelola menjelaskan bahwa berbagai kelompok sipil dan warga negara secara aktif berpartisipasi dalam semua proses pengambilan keputusan kebijakan dan mengekspresikan pendapat mereka melalui Internet. Semua kegiatan politik dan administrasi memiliki tempat di bidang e-government. Tentu saja, proses yang demokratis dan transparan yang kuat telah ditekankan. Beberapa transaksi muncul melalui jejaring antara entitas sosial. Tidak diragukan lagi, tingkat masyarakat sipil telah sangat matang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiono (2017:8) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa hasil dari wawancara dan observasi serta data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang dalam menganalisis masalah penelitian. Data sekunder dapat berupa literatur, dokumen, laporan dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Ciamis

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintahan daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Tata kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapatan SPBE secara terpadu. Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan

integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintahan Daerah. Peta rencana SPBE Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang di terapkan di pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki inovasi cukup baik di bidang Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik, terbukti dengan diraihnya nilai 3,90 dan masuk Top 10 SPBE Nasional. Inovasi tersebut diantaranya *website Ciamiskab.go.id*. Didalam *website* tersebut terdiri 104 sub domain *ciamiskab.go.id* dan 54 sub domain aplikasi *ciamiskab.go.id*, yang sudah berangsur dari tahun 2012 hingga saat ini, diantaranya domain masing-masing Dinas, Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini tertera dalam Keputusan Bupati nomor 049/016/Diskominfo.04 Tentang Daftar Domain dan Sub Domain Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis. Pengenalan sistem manajemen elektronik melalui *website Ciamiskab.go.id* di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merupakan Surat Kewenangan tugas pokok dan fungsi Kabupaten No. 49 *Ciamis.go.id*, disetujui pada tahun 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 1503 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi SPBE dan informasi dari beberapa aparatur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, bahwa target indeks kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2019 Kabupaten Ciamis mendapat nilai indeks kematangan SPBE 2,64 dengan predikat baik. Tahun 2020 masih dengan nilai yang sama seperti di tahun 2019 yaitu 2,64 dengan predikat baik. Tahun 2021 mendapat nilai indeks kematangan SPBE 2,8 dengan predikat baik. Tahun 2022 mendapat indeks kematangan SPBE 2,9 dengan predikat baik. Tahun 2023 dimana Kabupaten Ciamis mendapat nilai indeks kematangan SPBE 3 dengan predikat baik. Yang terakhir tahun 2024 dimana Kabupaten Ciamis mendapat nilai indeks kematangan SPBE 3,90 dengan predikat baik. Selain itu juga terdapat tata kelola yang sangat efisien yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dalam mewujudkan *smart governance* di Kabupaten Ciamis, terdapat keterlibatan dari semua *stakeholder* yang ada di Pemerintahan Kabupaten Ciamis dan ikut turut berpartisipasi saling mensukseskan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki kontribusi dari berbagai kalangan masyarakat dan swasta untuk menjalankan

program *smart governance* dalam meningkatkan kualitas informasi bagi penyelenggaraan pelayanan informasi dan meningkatkan penerapan *e-government* dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Kematangan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan SPBE mampu mendorong terwujudnya digitalisasi pemerintahan dan menciptakan *smart governance* untuk mewujudkan Ciamis *Smart City*. Akan tetapi terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah yaitu kapasitas sumber daya manusia yang tidak merata di Indonesia. Tidak semua masyarakat di daerah mau menerima dan terbuka terhadap teknologi. Sehingga hal ini menjadi penghambat untuk perkembangan SPBE di setiap daerah. Disamping itu adapun pola pikir pemerintah daerah yang masih kuno. Pemikiran yang masih kuno ini membuat daerah sulit untuk mengimplementasikan *e-government*.

Strategi dan Konsep Untuk Mewujudkan *Smart Governance*

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan alat dan *tools* atau layanan dapat diketahui bahwa, ditinjau dari Digitalisasi Administrasi dan Layanan Pemerintah bahwa untuk melaksanakan SPBE dan mewujudkan *smart governance* harus memiliki konsep strategi dan inovasi dengan membagi arah dan segmen pelaksanaan *smart city*. Konsep untuk *smart governance* sudah mencapai hampir 90% dalam mengupayakan membentuk desa cerdas, dibuktikan bahwa dari 231/258 desa yang sudah mengimplementasikan *e-office* desa sekaligus dengan SID (Sistem Informasi Desa) dan domain desa. Semua desa di Kabupaten Ciamis sudah memiliki akses internet, dibuktikan dengan 21 dari 285 desa difasilitasi akses internet dari bakti Kementerian Kominfo RI. Sehingga 21 desa ini tidak lagi mengeluarkan biaya layanan internet. Untuk desa lainnya memiliki akses internet mandiri dengan menggunakan alokasi dana desa. Digitalisasi administrasi dan layanan pemerintah dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Diskominfo Kabupaten Ciamis

Gambar 2. Digitalisasi Administrasi dan Layanan Pemerintah

Adapun untuk persiapan Kabupaten cerdas dalam mewujudkan *smart governance* Dinas Komunikasi dan Informatika mengupayakan 104 *Website* (OPD, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas) dan 54 Sistem Informasi/aplikasi layanan publik yang dikelola oleh semua OPD dan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Serta sebagai wujud inovasi proses bisnis, Diskominfo mengembangkan *e-office* Kabupaten sebagai layanan administrasi digital pemerintah daerah Kabupaten Ciamis (*Government to government dan government to employee*). Dalam layanan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparansi yaitu dengan layanan persuratan yang sudah dilengkapi modul tanda tangan elektronik dari BSRE, juga terdapat layanan lainnya seperti layanan kepegawaian dan elektronik SAKIP yang digunakan oleh seluruh ASN di Kabupaten Ciamis. Serta adapun untuk layanan publik digital terpadu (*Government to citizen*) yaitu dengan adanya aplikasi “Hello Ciamis”, yaitu integrasi tiap layanan OPD untuk publik dalam satu portal dan sudah tersedia dalam *playstore*. Hal ini mampu untuk mendukung Kabupaten Ciamis menjadi *smart governance*.

Adapun strategi pembangunan *smart governance* sangat penting dalam mewujudkan Sasaran *Smart City* di Kabupaten Ciamis yang mencakup layanan administrasi, Peninjauan Ulang/Review Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pengembangan *SuperApps*, yang mencakup peningkatan efisiensi dan produktifitas layanan pemerintah, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Serta dalam hasil pembahasan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan adanya Bimtek, yang berisi tentang program dengan mempertimbangkan RPJMD 2019-2024, dan kemudian diwujudkan dalam dimensi *smart city* serta menghasilkan penyusunan *Masterplan Smart city* dan *Quickwin*. Hasil dari *Quickwin* tersebut merupakan program unggulan Kabupaten Ciamis. Dari 94 inovasi yang terdata dalam dalam FGD, terdapat 6 *quick win* yang dapat menjadi solusi di Kabupaten Ciamis diantaranya Inovasi Sistem Informasi Terintegrasi Satu Pintu SITU (Diskominfo) untuk dimensi *Smart Governance*. Hal ini akan memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat dan tentunya dapat menyelesaikan suatu permasalahan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi kesiapan daerah dalam penerapan *smart city*.

Oleh karena itu penerapan *smart city* selalu diawali oleh dimensi *smart governance*. Untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien. Serta upaya pemerintahan yang

transparansi terhadap masyarakat serta jujur, bersih dan adil maka diperlukan partisipasi dari pemerintah dan masyarakat. Indikator dari *smart governance* meliputi faktor dari sisi politik yaitu adanya keterlibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan, pelayanan publik dan sosial bagi masyarakat serta pemerintahan yang transparan.

KESIMPULAN

Penerapan *Smart Governance* sudah mulai diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Ciamis. Dalam pengimplementasian konsep *Smart Governance*, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah merancang beberapa strategi atau konsep untuk dapat mencapai tujuan yang ada dalam pelaksanaan untuk mewujudkan Kabupaten Ciamis menjadi *Smart City*. Penerapan konsep *Smart Governnace* yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dilandaskan pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis. Dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Ciamis yang telah melek teknologi menjadikan peluang untuk dapat menerapkan konsep *Smart Governance*, melalui beberapa kebijakan dan program pembangunan dengan mengangkat aspek-aspek yang ada pada konsep *Smart City*, baik dalam menciptakan layanan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel dengan dapat memudahkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat Kabupaten Ciamis.

Sejalan dengan hal itu, dari segi teknis untuk bisa terselenggaranya *smart governance* di Kabupaten Ciamis mengacu pada kriteria utama *Masterplan smart city* dan dilakukan dengan adanya Bimtek, yang berisi tentang program dengan mempertimbangkan RPJMD 2019-2024. Perumusan strategi dan indikator yang tertuang dalam *Masterplan smart city* Kabupaten Ciamis yang dibuat dapat menyelesaikan suatu permasalahan, mampu menggambarkan arah yang jelas dalam jangka menengah, sejalan dengan misi *smart governance* dengan fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien, penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa. Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi kesiapan daerah dalam penerapan *smart governance* dengan mengkaji berbagai elemen fundamental yang mendukung pengembangan *smart city* dan didasarkan pada *roadmap* pengembangan *smart city* yang telah ditetapkan dengan mengacu pada setiap hasil *quick win* yang telah dirumuskan.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, D., Nesya, N., & Tyrta, M. (2023). Implementasi Kota Pintar (*Smart City*) Di Kota Surabaya. In *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* (Volume 5. No. 1 Februari 2023).
- APJII. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020, 1–146. <https://apjii.or.id/survei>
- Diskominfo, Ciamis. (2021). Hasil Evaluasi SPBE Kemenpan RB, Pemkab Ciamis Tembus Peringkat 3 Jawa Barat. <https://portal.ciamiskab.go.id/2021/12/30/hasil-evaluasi-spbe-kemenpan-rb-pemkab-ciamis-tembus-peringkat-3-jawa-barat/>, diakses tanggal 12 Juni 2024
- Estevez, E., & Janowski, T. (2013). *Electronic Governance for Sustainable Development – Conceptual framework and state of research*. *Government Information Quarterly*, 30 (supplement 1), S94-S109.
- Etin Indrayani. (2016). Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Academia.Edu*, 022, 2014. https://www.academia.edu/download/60457564/Buku_E-government20190901-116843-z73m6i.pdf
- Gil-Garcia, J. R., Helbig, N., & Ojo, A. (2014). *Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector*. *Government Information Quarterly*, 31 (supplement 1), I1–I8.
- Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 049/016/Diskominfo.04 Tentang Daftar Domain Dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis
- Masterplan *Smart City* Kabupaten Ciamis Tahun 2023
- Nam, T., & Pardo, T. A. (2011b). *Smart city as urban innovation: focusing c management, policy, and context*. In *ICEGOV '11 Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance* (hal. 185–194). <https://doi.org/10.1145/2072069.2072100>.
- Peraturan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis
- Prawansa, D. A., Nesya, N., & Tyrta, M. (2023). Implementasi Smart City Di Kota Surabaya. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 57-63.
- Scholl, H. J., & AlAwadhi, S. (2016b). *Smart governance as key to multijurisdictional smart city initiatives: The case of the City Gov Alliance*. *Social Science Information*, 55(2), 255-277.
- Sugiyono.2017. Medote Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
- UNECE, & ITU. (n.d.). The UNECE–ITU Smart Sustainable Cities Indicators.pdf.